



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 768 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebankan biaya atas pelaksanaan kegiatan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 - 6 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/768 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 26 - 6 - 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;
- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;

- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

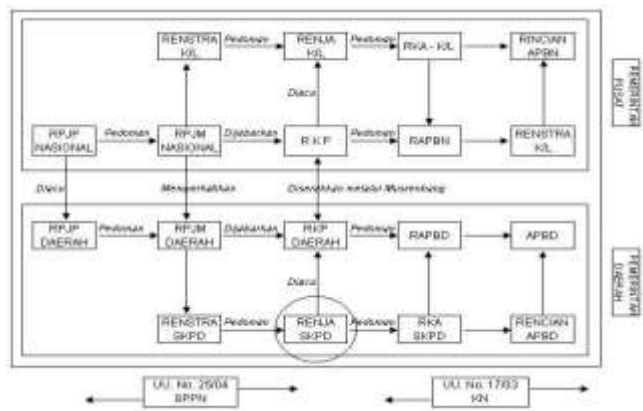
1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

Berpedoman Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Perubahan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan

penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Petunjuk Tehnis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
45. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan Tahun 2024-2026;
46. Perbup No Tahun 2024 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025
47. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026;
48. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pasuruan Tahun 2025;
49. Perbup No. 25 Tahun 2025 ttg P-RKPD Kab Pasuruan 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan pada Tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan serta menyusun anggaran pelaksanaan yang akan dilakukan Tahun 2025 sehingga mendukung tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan yang ada dalam RPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Triwulan II
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan dari kinerja capaian Sasaran PD, kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan maka disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Target Sasaran dan Indikator Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025	
				Target Renstra	Target PK
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	%	12,5	12,5
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	%	64,55	64,55
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	60	76,60
		Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	%	53,33	80,4
2.	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	poin	88	88

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perolehan capaian untuk semua indikator belum bisa diperoleh karena prosedur penilaian IKLH mengikuti timeline dari KLHK.

Beberapa argumentasi yang nantinya dapat menjelaskan pencapaian target tersebut yaitu, perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup nilai targetnya yaitu 12,5 %. Nilai tersebut merupakan Jumlah kecamatan yang persentase luasan RTH (publik perkotaannya + private dalam kategori cukup dibagi jumlah kecamatan di kabupaten.

Perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 nilai targetnya yaitu 64.55%. Nilai tersebut merupakan jumlah desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) dibagi jumlah seluruh desa dan kelurahan dikabupaten pasuruan ditambah jumlah kecamatan yang bebas dumping LB3 dibagi jumlah seluruh kecamatan di kabupaten pasuruan.

Perolehan indikator kinerja sasaran Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup nilai targetnya yaitu 60 %. Nilai tersebut merupakan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan.

Perolehan nilai Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah yaitu 53,33%. Nilai tersebut merupakan jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan.

Tahun 2021 melalui review Renstra DLH tahun 2018-2023 telah ditambahkan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator nilai SAKIP. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan optimalisasi pemahaman terhadap penilaian SAKIP, serta bekerjasama antar komponen dalam Dinas Lingkungan Hidup untuk memenuhi dokumentasi tiap-tiap tahapan perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melengkapi bukti dukungnya, selain itu juga meningkatkan mutu dari dokumen kelengkapan SAKIP. Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan telah melaksanakan 1 Program penunjang 11 Program Urusan Lingkungan Hidup , 23 kegiatan dan 61 sub kegiatan .

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Dokumen Perubahan Renja 2025 serta

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka akan disampaikan evaluasi sampai dengan triwulan II.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Renja (Pendapatan) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
PENDAPATAN :				
- RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN	1.725.893.900	808.235.000	917.658.900.	46,83
- RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM	581.831.806	183.950.500	397.881.306	31,62
JUMLAH PAD	2.307.725.706	992.185.500	1.315.540.206	42,99

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari beberapa OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dari retribusi persampahan sampai dengan Tribulan II sudah mencapai 46,83%, dan dari retribusi Laboratorium Lingkungan mencapai 31,62%.

Retribusi pelayanan persampahan pada tribulan I sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Retribusi pelayanan uji laboratorium juga mengalami capaian sesuai target yang ditetapkan. UPT Laboratorium Lingkungan Kab. Pasuruan hanya melayani uji kualitas air limbah dimana tidak semua parameter uji bisa dilakukan, namun dengan banyaknya jumlah perusahaan atau industri yang merupakan sasaran atau customer target masih dapat tercapai. Melihat potensi industri yang besar dan ekstensifikasi jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh UPT Laboratorium, maka dukungan yang optimal dari Pemda Kab. Pasuruan sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan yang dapat berimbas pada peningkatan PAD dari pelayanan uji air limbah.

Tabel 2.3
Evaluasi Renja (realisasi belanja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
BELANJA :				
BELANJA PEGAWAI	9.521.065.046	3.597.832.150	5.923.232.896	37,79
BELANJA BARANG DAN JASA	14.785.480.969	3.966.612.017	10.818.868.952	26,83
BELANJA MODAL	1.050.985.170	7.634.000	1.043.351.170	0,73
JUMLAH BELANJA	25.357.531.185	7.572.078.167	17.785.453.018	29,86

Berdasarkan tabel diatas secara umum menunjukkan bahwa capaian serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup cukup yaitu berada pada kisaran 29,86%. Berdasarkan rincian jenis belanja secara berurutan dari yang tertinggi capaian serapannya adalah belanja pegawai (37,79%), belanja barang dan jasa (26,83%) dan yang terakhir belanja modal (0,73%).

Belanja barang dan jasa serta belanja modal berisikan jenis belanja yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pelayanan urusan lingkungan hidup yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Belanja modal serapannya masih hanya 0,73% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran melalui proses pengadaan barang dan jasa melalui proses tender, pengadaan langsung dan e- catalog. Belanja pegawai hal ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya karena anggaran belanja pegawai sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sedangkan belanjanya diatur oleh Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Belanja barang dan jasa serta belanja modal yang disebabkan karena masih kurang cermatnya perencanaan dan penganggaran, dimana proses perencanaan dan penganggaran pada T-1 belum secara detail disusun, sehingga pada saat tahun berjalan, masih membutuhkan waktu untuk pendetailan kelengkapan proses pengadaan seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Aksi untuk pendetailan jadwal dan lain-lainnya. Perencanaan yang kurang detai juga akan berimbas pada proses monitoring dan evaluasi yang kurang optimal.

Tabel 2.4
Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
DANA :				
DAU	15.762.872.122	4.587.336.865	11.175.535.257	29,10
PAT	9.594.659.063	2.984.741.302	6.609.917.761	31,11
TOTAL	25.357.531.185	7.572.078.167	17.785.453.018	29,86

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DAU (29,10%) sedangkan dari PAT atau Pajak Air Tanah sebesar 31,11%. Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DLH yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi (Renstra) DLH Tahun 2024-2026.

Kinerja DLH diuraikan melalui tujuan yaitu “Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;” dengan indikator Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan dua sasaran yaitu “Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” dan “meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sasaran “Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” memiliki 4 (empat) indikator dan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah” memiliki 1 (satu) indikator.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.) Dinas Lingkungan Hidup dalam renja 2025 mendukung sasaran PRPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 melalui 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator yang sampai dengan tribulan II tahun 2025 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Evaluasi Renja (Tujuan/Sasaran) Dinas Lingkungan Hidup
Tribulan I dan Tribulan II Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI		Capaian	
			Tribulan I	Tribulan II	Tribulan I	Tribulan II
	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					
1.	Persentase penurunan beban pencemaran dan	2,26%	-	-	-	-

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI		Capaian	
			Tribulan I	Tribulan II	Tribulan I	Tribulan II
	kerusakan lingkungan hidup					
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup					
1.1.	Persentase Upaya Penaatan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	-	100%	-
1.2.	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	64,55%	56,6%		87,68%	
1.3.	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,6%	-		-	
1.4.	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	80.4%	6,25%		7,77%	
2	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
2.1	Nilai SAKIP DLH	88	-		-	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan maupun sasaran capaiannya diatas target yang ditetapkan.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan pada triwulan I dan II yaitu indikator tujuan **Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup** Realisasi capaian sebagaimana Tujuan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sampai dengan Triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Triwulan I dan II) masih menunjukkan realisasi 0 (sesuai dengan target). Pada Triwulan ini masih dalam tahap pengujian yang nanti data yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas lingkungan ini selanjutnya pada akhir periode (tahun) akan menjadi dasar menghitung Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (IKLH dan IKPS). Nilai indeks masing-masing komponen tersebut akan diperoleh pada triwulan IV.
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan berdasarkan 4 (empat) Sasaran indikator adalah sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup** realisasi pada triwulan II sebesar 0% dikarenakan sudah terpenuhi di triwulan I dan untuk triwulan II untuk memonitoring dan mengevaluasi serta mempertahankan kinerja.
 - b) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB 3** realisasi pada triwulan I tercapai realisasi 56,6 %. Capaian kinerja Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB 3 realisasi pada triwulan I yaitu 87,68%. Keberhasilan capaian ini sebagai gambaran pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Pasuruan. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - c) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** realisasi pada triwulan I masih belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan belum dilakukan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara) dimana pengujian tersebut dilakukan

setiap 6 bulan sekali atau pada triwulan II dan triwulan IV . Target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- d) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah** pada Triwulan I realisasi sebesar 6,25% . Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- e) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator **Nilai SAKIP** pada triwulan I belum terdapat realisasi.

2.) Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 11 program, 23 kegiatan dan 61 sub kegiatan. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.6

Berdasarkan data yang termuat pada tabel 2.6 tentang realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 untuk triwulan I , dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) memiliki performa yang baik dalam penyerapan anggaran yaitu pada triwulan I mencapai 20,10% , sedangkan program yang kinerjanya paling rendah dalam penyerapan anggaran yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk

Masyarakat yang masih 0%.

Penyerapan anggaran memiliki beberapa tahapan proses yang memerlukan kecermatan dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya, kondisi diatas akan menjadi evaluasi dan penyusunan strategi untuk mengoptimalkan serapan anggaran pada DLH dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.

Pada performa realisasi kinerja untuk program dengan capaian kinerja yang paling tinggi yaitu Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu realisasi triwulan I 100%, sedangkan Program dengan performa kinerja terendah adalah Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang masih 0%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki indikator dengan perhitungan atau formulasi tindaklanjut penanganan pengaduan melalui penerapan sanksi administrative dibagi pengaduan yang ditindaklanjuti, dimana tekanan social cukup tinggi, sehingga target akan diupayakan bagaimanapun terealisasi, yaitu tindak lanjut dari pengaduan yang ditindaklanjuti. Kinerja dari Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat perlu dievaluasi dan dibicarakan bersama untuk pencapaian target kinerjanya.

Di tahun 2025 ini pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat perubahan kebijakan yang menyebabkan adanya pengajuan nota dinas kepada Bupati maupun atensi langsung dari bupati, kebijakan tersebut yaitu:

1. Pembenahan/Penataan TPA Wonokerto

Menindaklanjuti surat dari Menteri Lingkungan Hidup nomor : S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, maka disusunlah *draft* Keputusan Bupati Pasuruan tentang Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pasuruan. Dalam peta jalan tersebut membutuhkan upaya pembenahan TPA Wonokerto pada tahun 2025 dan 2026.

PETA JALAN PENUNTASAN PENGELOLAN SAMPAH

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
I		PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU						
A		Perencanaan program penuntasan pengelolaan sampah						
1		<u>Penyusunan peta jalan rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah</u>					DLH	KLH, DLH Prov Jawa Timur, Bappelitbangda, Dinas PUSDACITA, Bagian Hukum
	a	Mengidentifikasi dan menganalisis data pengelolaan sampah	Laporan analisis data pengelolaan sampah	Dokumen	1			
	b	Menyusun target pengelolaan sampah yang disinkronkan dengan Target RPJPD 2025-2045	Target pengelolaan sampah 2025-2045	Dokumen	1			
	c	Menyusun matriks Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah	Matriks Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah	Dokumen	1			
	d	Menyusun Surat Keputusan Bupati terkait Peta Jalan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah	Surat Keputusan Bupati yang telah ditetapkan	Dokumen	1			
	e	Melakukan sosialisasi/publikasi Surat Keputusan Bupati terkait Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pasuruan	Sosialisasi/publikasi Surat Keputusan Bupati	Dokumen	1			
B		Pendampingan melalui penyuluhan maupun penyediaan informasi publik						
1		<u>Pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (PELHI)</u>					DLH	KLH, BKPSDM
	a	Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan Pejabat Fungsional PELHI	Review analisis jabatan	Dokumen	1			

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	b	Mendata pegawai yang dapat mengisi kebutuhan sebagai Pejabat Fungsional PELHI	Data pegawai calon Fungsional PELHI	Dokumen/tahun		1		
	c	Melakukan Pengadaan Pejabat Fungsional PELHI	Laporan Pengadaan Pejabat Fungsional PELHI	Dokumen/tahun		1		
2		<u>Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh LH secara berkala</u>					DLH	KLH, BKPSDM
	a	Menyusun <i>Key Performance Indikator</i> pengelolaan sampah untuk Pejabat Fungsional PELHI	Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	Dokumen/tahun	1	1		
	b	Melakukan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan teknis bagi Pejabat Fungsional PELHI	Laporan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Dokumen/tahun		1		
	c	Melakukan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PELHI	Laporan Kinerja Pejabat Fungsional PELHI	Dokumen/tahun	1	1		
3		<u>Pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan</u>					DLH, Dispendikbud	KB, TK, SD, SMP dan sederajat
	a	Menyusun materi substansi pengelolaan sampah untuk setiap jenjang pendidikan (KB, TK, SD, SMP)	Materi pengelolaan sampah untuk anak sekolah	Dokumen		4		
	b	Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait materi substansi pengelolaan sampah yang telah disusun	Notulensi rapat	Dokumen		1		
	c	Melakukan sosialisasi integrasi substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan	Sosialisasi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan	Kegiatan/tahun		1		
	d	Membuat <i>pilot project</i> sekolah percontohan integrasi substansi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan	Surat Keputusan <i>Pilot Project</i> sekolah percontohan	Dokumen		1		

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	e	Melakukan evaluasi <i>pilot project</i> percontohan integrasi tersebut	Laporan Evaluasi	Dokumen		1		
4		<u>Peningkatan jumlah sekolah adiwiyata</u>					DLH, Dispendikbud, Tim Pembina Adiwiyata	KLH
	a	Melakukan sosialisasi/publikasi terkait adiwiyata kepada sekolah-sekolah	Sosialisasi Program Adiwiyata	Kegiatan/ tahun	1	1		
	b	Melakukan koordinasi dengan sektor swasta untuk mendorong peran serta sebagai pendamping adiwiyata melalui program CSR	Notulensi rapat	Dokumen		1		
	c	Memfasilitasi sekolah untuk mengikuti program adiwiyata	Laporan Pendampingan	Dokumen	1	1		
5		<u>Perubahan perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)</u>					DLH, Dinas Kominfo	Perguruan Tinggi, FORDAS
	a	Menyusun panduan, media kampanye, dan atribut kampanye pengelolaan sampah	Panduan KIE Pengelolaan Sampah	Dokumen		1		
	b	Melakukan pembuatan flyer, baliho, media sosial dan media elektronika terkait pemilahan dan pengurangan sampah di sumber	Flyer, baliho, konten media sosial dan media elektronika	Paket		1		
	c	Memasang baliho dan media edukasi pada tempat-tempat strategis atau kawasan	Baliho dan media edukasi yang terpasang	Paket		1		
	d	Melakukan pembuatan dan pemutaran video edukasi terkait pengelolaan sampah pada chanel informasi di tempat strategis	Video edukasi yang terputar	Paket		1		
	e	Mengembangkan sistem informasi sebagai sarana pembinaan dan pelaporan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kab. Pasuruan	Dokumen		1		

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	f	Menyusun panduan pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengelolaan Sampah	Panduan pelaksanaan KKN Tematik Pengelolaan Sampah	Dokumen		1		
C		Perbaikan tata kelola sampah						
1		<u>Penguatan instrumen tata kelola sampah</u>					DLH, Dinas PUSDACITA	KemenPUPR, KLH, DLH Prov Jawa Timur, Bappelitbangda, Dinas Kominfo
	a	Menyusun dan mengkaji ulang standar pengelolaan sampah di tingkat hulu dan hilir, meliputi:	Kajian Standar Pengelolaan Sampah					
		-Biaya penanganan sampah		Dokumen	1			
		-Sarana dan prasarana penanganan sampah		Dokumen	1			
		-Prosedur Operasional Standar penanganan sampah		Dokumen	1			
		-Kriteria teknologi ramah lingkungan		Dokumen	1			
		-Kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah		Dokumen	1			
		-Retribusi jasa pelayanan persampahan		Dokumen	1			
	b	Melakukan publikasi/sosialisasi terkait Standar pengelolaan sampah	Sosialisasi/publikasi Standar Pengelolaan Sampah	Kegiatan/tahun	1			

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
2		<u>Perbaikan tata kelola kelembagaan pelayanan persampahan (pemisahan regulator persampahan yaitu DLH), dengan operator yaitu pengelola sampah desa/kelurahan, kawasan, pelaku usaha/kegiatan)</u>					DLH	Bappelitbangda, Inspektorat, DPMD, Tapem, Bagian Hukum, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
	a	Melakukan konsultasi publik terkait kewenangan desa/kelurahan sebagai pengelola pelayanan persampahan di tingkat hulu	Konsultasi Publik terkait kewenangan desa/kelurahan dalam pelayanan persampahan	Kegiatan		1		
	b	Menyusun kebijakan terkait kewenangan desa/kelurahan sebagai pengelola pelayanan persampahan di tingkat hulu	Kebijakan	Dokumen		1		
	c	Melakukan sosialisasi/publikasi kebijakan tata kelembagaan pengelolaan sampah	Sosialisasi kebijakan tata kelembagaan pengelolaan sampah	Kegiatan		1		
	d	Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah oleh pengelola pelayanan persampahan	Sistem pemantauan dan evaluasi	Dokumen		1		
3		<u>Mewajibkan desa/kelurahan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sampah</u>					Pemerintah Desa/Kelurahan, DLH	DPMD, Tapem, Bagian Hukum, Kecamatan
	a	Pendampingan penyusunan kebijakan pengelolaan sampah bagi desa/kelurahan	Laporan Pendampingan	Dokumen/tahun	1	1		
	b	Penetapan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan	Kebijakan pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan	Dokumen	10	10		
D		Peningkatan alokasi pendanaan pengelolaan sampah						
1		<u>Peningkatan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah paling sedikit 3% dari APBD</u>					DLH, DPMD, Tapem	TAPD, Legislatif, Inspektorat, Bappelitbangda, Dinas

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	a	Melakukan koordinasi eksekutif, legislatif, Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Swasta terkait pendanaan pengelolaan sampah	Notulensi rapat	Dokumen	1	1		Permdag, Dinas Pariwisata, Bagian Hukum, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi
	b	Menyusun peraturan perundangan terkait pendanaan pengelolaan sampah untuk desa dan kelurahan	Kebijakan pendanaan persampahan untuk desa dan kelurahan	Dokumen		1		
	c	Melakukan sosialisasi/publikasi terkait kebijakan alokasi pendanaan pengelolaan sampah untuk desa dan kelurahan	Sosialisasi/publikasi kebijakan pendanaan	Kegiatan		1		
	d	Melakukan evaluasi alokasi pendanaan pengelolaan sampah yang dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Laporan Evaluasi alokasi pendanaan	Dokumen/tahun		1		
2		<u>Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber</u>					DLH, Bappelitbangda	Inspektorat, Bagian Hukum, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi
	a	Melakukan konsultasi publik terkait kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber	Konsultasi Publik terkait kebijakan insentif dan disinsentif	Kegiatan		1		
	b	Menyusun kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber	Kebijakan insentif dan disinsentif	Dokumen		1		
	c	Melakukan sosialisasi/publikasi kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber	Sosialisasi/publikasi terkait kebijakan insentif dan disinsentif	Kegiatan		1		
E		Pengurangan sampah dan pemilahan sampah di sumber						
1		<u>Penetapan kewajiban pengurangan sampah dan pemilahan sampah di sumber</u>					DLH	Semua OPD, Pelaku usaha/kegiatan, Pengelola Kawasan, Pemerintah Desa/Kelurahan, FORDAS
	a	Membuat Surat Edaran kepada masyarakat	Surat Edaran kepada masyarakat	Dokumen	1			

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	b	Membuat Surat Edaran kepada seluruh pelaku usaha/kegiatan dan pengelola kawasan	Surat Edaran kepada seluruh pelaku usaha/kegiatan dan pengelola kawasan	Dokumen	1			
	c	Membuat Instruksi Bupati kepada Seluruh Perangkat Daerah, ASN, dan instansi lain	Instruksi Bupati kepada Seluruh Perangkat Daerah, ASN, dan instansi lain	Dokumen	1			
	d	Melakukan sosialisasi/publikasi terkait kebijakan pengurangan sampah dan pemilahan sampah di sumber	Sosialisasi/publikasi terkait kebijakan pengurangan sampah dan pemilahan sampah	Kegiatan	1			
	e	Membuat sistem monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengurangan sampah dan pemilahan sampah di sumber	Sistem monitoring dan evaluasi	Dokumen	1			
	f	Membuat program apresiasi/penghargaan kepada permukiman, pelaku usaha dan kawasan	KAK Program apresiasi/penghargaan	Dokumen	1			
2		<u>Pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam PermenLHK Nomor 75 Tahun 2019</u>					DLH	KLH, DLH Prov Jawa Timur, pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang: manufaktur; ritel; jasa makanan dan minuman; Dinas Perindag, Dinas Pariwisata
	a	Menyusun panduan pelaksanaan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) oleh produsen kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah milik produsen	Panduan Pelaksanaan PJLH	Dokumen	1			
	b	Melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai kewajiban penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen	Notulensi rapat	Dokumen		1		
	c	Membuat sistem pelaporan penyusunan peta jalan pengurangan sampah bagi produsen	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kab. Pasuruan	Dokumen		1		
	d	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan oleh Produsen	Dokumen/tahun		1		

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
3		<u>Penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW</u>					DLH	Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan
	a	Melakukan sosialisasi terkait pengurangan sampah melalui pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah di sumber serta pemilahan sampah di sumber	Laporan Sosialisasi pengelolaan sampah tingkat RW	Dokumen/tahun	1	1		
	b	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengurangan sampah dan pemilahan sampah dari sumber	Laporan monitoring dan Evaluasi	Dokumen/tahun	1	1		
F		Pengoptimalan lembaga Bank Sampah sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dan mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular						
1		<u>Pembentukan lembaga Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI)</u>					Pemerintah Desa/Kelurahan, DLH	KLH, DLH Prov Jawa Timur, Kecamatan, BSI, BSU, Dinas Kominfo
	a	Membentuk paling sedikit 1 BSU di setiap RW dan 1 BSU di tingkat Desa/Kelurahan, dengan melibatkan masyarakat rentan, guna perlindungan sosial, lingkungan hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat	Lembaga BSU untuk edukasi masyarakat dan mengelola sampah anorganik layak jual	unit	50	50		
	b	Membentuk paling sedikit 1 BSI di wilayah Kabupaten guna melakukan pembinaan pada BSU di bawah koordinasinya	Lembaga BSI untuk membina BSU	unit	1	1		
	c	Mempublikasikan aktivitas Bank Sampah pada media KIE	Publikasi aktivitas Bank Sampah	Paket	20	20		
2		<u>Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan Bank Sampah melalui pembinaan kepada Kader pengurus BSU meliputi:</u>	Materi peningkatan kapasitas				DLH	KLH, DLH Prov Jawa Timur, BSI, BSU, Dinas PUSDACITA, LSP, Perguruan Tinggi
		- Pemilahan dan pengomposan dari sumbernya		Dokumen	1			

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
		- Penimbangan dan pencatatan tabungan pelanggan		Dokumen	1			
		- Manajemen pelaporan keuangan		Dokumen	1			
		- Skema kolaborasi dengan Sistem TPS 3R (jika berbeda manajemen)		Dokumen	1			
		- Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan sampah melalui sistem informasi KLH		Dokumen	1			
3		<u>Mengembangkan bank Sampah menjadi Bisnis sosial</u>					DLH, FORDAS	Dinas Perindag, BSU, BSI, Industri Daur Ulang dan jaringannya
	a	Memfasilitasi koordinasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) antara BSU (selaku penyedia jasa) dengan Produsen (selaku pemanfaat) guna membantu pembiayaan BSU	Notulensi rapat	Dokumen/tahun	1	1		
	b	Membangun jejaring BSU-BSU antar RW untuk meningkatkan <i>collection rate</i> /tingkat pengumpulan pilahan sampah dengan BSU tingkat Desa	Aplikasi Bank Sampah	Dokumen		1		
	c	Memfasilitasi kerja sama Bank Sampah dengan <i>offtaker</i> / industri daur ulang guna memberikan akses pasar	Pertemuan Bank Sampah - <i>Offtaker</i>	Kegiatan/tahun	1	1		
G		Pengembangan pengelolaan sampah kawasan yang berwawasan lingkungan						
1		Membuat Surat Edaran yang mewajibkan pelaku usaha/kegiatan dan pengelola kawasan (baik permukiman maupun non permukiman) untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri	Surat Edaran kepada seluruh pelaku usaha/kegiatan dan pengelola kawasan	Dokumen	1		DLH	Pelaku usaha dan/atau kegiatan, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dispendikbud

No	URAIAN KEGIATAN		OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
2	Menyediakan TPS 3R/PDUS di setiap desa/kelurahan dengan kapasitas yang memadai untuk memfasilitasi pengumpulan 100% sampah di wilayah tersebut, serta dilengkapi sarana prasarana paling tidak untuk keperluan: Pengumpulan, pemilahan, pengomposan/pengolahan sampah organik, pemadatan, dan penyimpanan hasil pilahan		Infrastruktur TPS 3R/PDUS di setiap desa/kelurahan beserta sarana prasarana	Unit	5	5	Pemerintah Desa/Kelurahan	KLH, KemenPUPR, Dinas PUSDACITA, Sektor Swasta, DLH
3	Membentuk kelembagaan TPS 3R di tingkat Desa/Kelurahan, dengan melibatkan masyarakat rentan, guna perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan peningkatan pendapatan masyarakat		Lembaga TPS 3R untuk mengelola organik komunal dan residu	unit	5	5	Pemerintah Desa/Kelurahan	DLH, Dinas PUSDACITA,
4		Mempublikasikan aktivitas TPS 3R pada media KIE	Publikasi aktivitas TPS 3R	Paket	20	20	Pemerintah Desa/Kelurahan, DLH	TPS 3R, Kecamatan, Dinas Kominfo
5		Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan TPS 3R/PDUS melalui pembinaan kepada Kelompok pengurus meliputi:	Materi peningkatan kapasitas				DLH	KLH, DLH Prov Jawa Timur, BSI, BSU, Dinas PUSDACITA, LSP, Perguruan Tinggi
		- Penimbangan dan pencatatan hasil pilahan sampah di TPS 3R		Dokumen	1			
		- Pengumpulan dan penjadwalan hasil pilahan sampah		Dokumen	1			
		- Pengolahan sampah organik		Dokumen	1			
		- Pemadatan dan pengiriman pilahan sampah		Dokumen	1			
		- Manajemen pelaporan keuangan		Dokumen	1			

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
		- Skema kolaborasi dengan Sistem BSU (jika berbeda manajemen)		Dokumen	1			
		- Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan sampah melalui sistem informasi KLH		Dokumen	1			
4		Memfasilitasi koordinasi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) antara BSU (selaku penyedia jasa) dengan Produsen (selaku pemanfaat) guna membantu pembiayaan TPS 3R					DLH, FORDAS	KLH, Sektor swasta, Dinas Perindag,
5		Membangun jejaring TPS 3R dengan BSU-BSU antar RW untuk meningkatkan <i>collection rate</i> /tingkat pengumpulan sampah utamanya organik dan residu	Aplikasi pengumpulan sampah	Dokumen		1	DLH	Dinas Perindag, Industri Daur Ulang dan jaringannya
6		Memfasilitasi kerja sama TPS 3R dengan <i>offtaker</i> / industri daur ulang guna memberikan akses pasar	Pertemuan TPS 3R - <i>Offtaker</i>	Kegiatan/tahun	1	1		
7		Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah baik pelaku usaha/kegiatan, Pengelola Kawasan, serta Pemerintah desa/kelurahan agar dapat:	Laporan monitoring dan evaluasi	Dokumen/tahun		1	DLH	Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dispendikbud
		- Mengolah sampah organik						
		- Memilah secara optimal sampah anorganik layak jual untuk digunakan sebagai bahan baku industri						
		- Memastikan residu terolah menjadi sumber energi atau dikelola dengan baik untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman						
II		PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR						
A		Peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha/kegiatan, pengelola kawasan, Pemerintah Desa/Kelurahan atas peraturan perundangan pengelolaan sampah						

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	a	Melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di sumber	Berita Acara Pengawasan	Dokumen		1	DLH, Satpol PP	Pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dispendikbud
	b	Melakukan pengawasan terhadap kewajiban pemilahan sampah di sumber dan pengolahan sampah organik secara mandiri di sumber atau menjalin kemitraan dengan fasilitas pengolahan sampah yang memiliki bukti kompetensi	Berita Acara Pengawasan	Dokumen		1		
	c	Melakukan pengawasan terhadap kewajiban pengelolaan residu dengan mengutamakan pengelolaan "waste to energy" dengan menjalin kemitraan dengan fasilitas pengolahan sampah yang memiliki bukti kompetensi	Berita Acara Pengawasan	Dokumen		1		
	d	Melakukan pengawasan terhadap kewajiban pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah	Berita Acara Pengawasan	Dokumen		1		
	e	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka	Laporan Kegiatan Penertiban	Dokumen		1		
B		Industrialisasi pengelolaan sampah						
1		<u>Mendorong pertumbuhan industri daur ulang yang dapat mengolah bahan baku industri hingga menjadi produk untuk memastikan sirkular ekonomi dari setiap jenis pilahan sampah</u>					DLH	Disperindag, DPMPSTP
	a	Identifikasi industri daur ulang dan jenis bahan baku industrinya serta menganalisa potensi pengembangan	Laporan identifikasi	Dokumen		1		
	b	Identifikasi mekanisme kebijakan yang mendorong investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Laporan identifikasi	Dokumen		1		

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	c	Memfasilitasi koordinasi dengan sektor swasta untuk membuka peluang investasi di bidang industri daur ulang baru/pengembangan dari yang sudah ada	Pertemuan	Kegiatan/tahun		1		
2		<u>Melakukan inkubasi bisnis pengelolaan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi yang dikelola secara profesional</u>					DLH	Dinas Perindag, LSP, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP, Dinas PUSDACITA
	a	Penyusunan rencana kegiatan inkubasi bisnis untuk pengolahan sampah (IKM maupun produk baru)	Kajian Perencanaan	Dokumen		1		
	b	Identifikasi potensi skema pendanaan untuk IKM pengelolaan sampah	Laporan identifikasi	Dokumen		1		
	c	Melakukan pendataan terhadap TPS 3R/PDUS eksisting yang memiliki potensi ditingkatkan menjadi IKM	Data potensi TPS 3R/PDUS eksisting	Dokumen		1		
	d	Melakukan pendampingan pemenuhan perizinan berusaha bagi IKM pengelolaan sampah	Laporan pendampingan	Dokumen		1		
	e	Melakukan pembinaan terhadap IKM pengolahan sampah agar memenuhi standar kualitas bahan baku industri daur ulang atau standar produk yang akan dipasarkan	Laporan pembinaan	Dokumen		1		
	f	Melaksanakan kegiatan pameran inovasi untuk usaha pengelolaan sampah dan daur ulang	Pameran inovasi	Kegiatan/tahun		1		
3		<u>Meluncurkan penghargaan dan hibah inovasi di bidang pengelolaan sampah</u>					Bappelitbangda, DLH	Dinas Koperasi dan UMKM
	a	Melakukan penyusunan kajian perencanaan hibah inovasi	Kajian perencanaan hibah inovasi	Dokumen		1		
	b	Menetapkan kebijakan pemberian hibah inovasi di bidang pengelolaan sampah	Kebijakan pemberian hibah inovasi	Dokumen		1		

No		URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	Satuan	TARGET		Instansi Pelaksana	Instansi/lembaga Terkait
					2025	2026		
	c	Memberikan apresiasi dengan pemberian hibah inovasi di bidang pengelolaan sampah	KAK Program apresiasi/penghargaan	Dokumen		1		
C		Pembenahan TPA						
1		Melakukan penataan TPA agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja						

Pembenahan TPA yang dilakukan untuk tahun 2025, dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Kab. Pasuruan tahun 2025, dimana kami membutuhkan tambahan belanja sebesar Rp. 3.900.000.000,-

No. Pri ori tas	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembenahan TPA Wonokerto	Dokumen	1	100.000.000	100.000.000
2	Pengadaan Alat Berat (Excafator)	Unit	1	3.700.000.000	3.700.000.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Landfill Maining TPA Kenep	Dokumen	1	100.000.000	100.000.000

Dan untuk Operasional TPA anggaran BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Penanganan Sampah yang tertera pada DPA tahun 2025 yaitu sejumlah **Rp. 2.231.928.642 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)**, dimana berdasarkan perhitungan kami anggaran tersebut hanya mencukupi untuk 7 bulan operasional (Januari – Juli 2025), sehingga untuk 5 bulan tersisa, kami tidak bisa melaksanakan pengambilan sampah dan pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Berdasarkan perhitungan kami, anggaran yang dibutuhkan untuk mencukupi 5 bulan tersisa adalah **RP. 1.825.718.238,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dengan bukti dukung terlampir.

1. Penentuan Recharge Area (Daerah Resapan Air) dan Discharge Area (Daerah Lepas Air) Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil Rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Kunjungan ke Kementerian ATR / BPN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, dimana disimpulkan bahwa untuk melakukan pengajuan Peninjauan Kembali Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dibutuhkan kajian / data pendukung salah satunya yaitu kajian “Penentuan Recharge Area (Daerah Resapan Air) dan Discharge Area (Daerah Lepas Air) Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hasil koordinasi yang kami lakukan, anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen tersebut yaitu Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penentuan daerah resapan air tanah (recharge area) dengan pendekatan kajian dan analisis terintegrasi dari aspek hidrogeologi, geologi, geomorfologi, lingkungan, dan tata guna lahan. Metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan recharge area dan discharge area:

1. Interpretasi, Kajian dan Analisis Kondisi Geologi & Hidrogeologi

Mengidentifikasi jenis batuan, struktur geologi, dan lapisan akuifer, penyebarannya baik secara lateral maupun vertikal. Batuan berpori dan permeabel seperti pasir, kerikil, kerakal dan material vesikular, dan/atau terkekarkan secara intensif dapat / sering berperan sebagai daerah resapan yang baik.

2. Analisis Morfologi, Topografi dan Kemiringan Lereng

Daerah dengan ketinggian menengah hingga tinggi dan lereng landai sering berperan sebagai zona resapan.

3. Analisis Curah Hujan dan Infiltrasi

Daerah dengan curah hujan tinggi dan tanah yang mudah menyerap/mengalirkan air ke bawah (infiltrasi tinggi) berpotensi menjadi recharge area.

4. Pemetaan Tata Guna Lahan dan Tutupan Lahan (Land Use/Land Cover)

Hutan, semak belukar, dan area pertanian konservatif cenderung memiliki tingkat resapan yang lebih tinggi dibanding permukiman atau jalan beraspal.

5. Pemetaan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)

Mengintegrasikan semua parameter antara lain jenis tanah/batuan, curah hujan, struktur geologi, tutupan lahan, kemiringan lereng ke dalam satu platform. Analisis spasial seperti overlay analysis dan weighted overlay digunakan untuk menentukan zona recharge potensial.

6. Pemodelan Sistem Hidrogeologi atau Model Neraca Air

Pemodelan sistem hidrogeologi untuk menentukan zona recharge dan discharge dengan software MODFLOW.

7. Survei Geofisika

Metode Geolistrik (Resistivity) untuk mengidentifikasi keberadaan, penyebaran, dan kedalaman sistem akuifer.

Prakiraan anggaran kajian penentuan recharge area dan discharge area Kabupaten Pasuruan meliputi:

- a. Tenaga Ahli dan Asisten
- b. Biaya operasional (pengambilan data, analisis laboratorium, akomodasi dan transportasi)
- c. Biaya Studio
- d. Fee Institusi 10 %

Dengan total anggaran Rp.550.000.000,-.

2. Optimalisasi pengendalian pencemaran di Kecamatan Lekok, dengan fokus yaitu :

- a. Pencemaran limbah kotoran ternak (sapi perah) yang berada di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok yang terjadi baik di lingkungan permukiman, saluran air dan sungai2 terdekat. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu melalui:

- a) Penghentian sumber pencemar, yaitu melaksanakan upaya persuasif untuk menghentikan perilaku membuang kotoran ternak langsung ke saluran / sungai;
 - b) Pengumpulan limbah kotoran ternak pada tempat khusus untuk penanganan selanjutnya;
 - c) Pengangkutan limbah, mengangkut limbah ternak menuju lokasi pengolahan;
 - d) Pengolahan limbah, limbah kotoran ternak diolah menjadi kompos, bahan bakar dan sebagainya.
- b. Pengelolaan sampah yang tidak optimal di Kecamatan Lekok. Potensi timbulan sampah yang mencapai 55 Ton / hari menjadi potensi pencemaran air dan udara yang terjadi karena tidak optimalnya pengelolaan sampah, maka terdapat kebijakan untuk mengelola sampah dimaksud melalui pengadaan dan penanganan sampah dengan insenerator dan penanganan residu sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel).

3. Optimalisasi UPT Laboratorium Lingkungan

Menindaklanjuti momentum periode penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka sebagai bentuk sinkronisasi kegiatan tersebut, kami bermaksud menyampaikan rencana pengembangan UPT Laboratorium Lingkungan. Pengembangan tersebut untuk peningkatan kinerja DLH dalam memberikan pelayanan yang terbaik, akurat dan terpercaya kepada Masyarakat sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Mohon izin kami menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

A. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan Perbup Nomor 192 Tahun 2021 tentang SOTK UPT Lab. Lingkungan, dapat dijelaskan beberapa poin terkait UPT Laboratorium Lingkungan saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berlokasi di Jl. Pattimura, no 223, Kelurahan Bugul, Kota Pasuruan, dengan beberapa sarpras yang membutuhkan perbaikan;
2. Merupakan laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP – 715 IDN dengan jumlah parameter akreditasi sebanyak parameter ;
3. Saat ini UPT Laboratorium sedang melaksanakan proses registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahap permohonan surat rekomendasi dari Komite Akreditasi Nasional ;
4. Personil yang ada sejumlah 7 (tujuh) orang (ASN : 2 orang dan Non ASN : 5 orang) yang bertugas dalam pengujian kualitas air dan air limbah;
5. Peralatan laboratorium yang ada hanya dapat menguji 29 parameter air limbah, air bersih dan air sungai;
6. UPT Laboratorium Lingkungan memiliki armada yang digunakan untuk kegiatan pengambilan contoh uji kualitas air dan air limbah sejumlah 2 unit, yaitu 1 unit Daihatsu Luxio dan 1 unit Nissan Navara;
7. Memiliki peralatan uji kualitas udara hanya berupa Gas Sampler HTECH 05, namun belum tersedia personil yang kompeten dan tersertifikasi;
7. Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja (DAU) sebesar Rp. 600.924.713,-
8. Tahun 2024 melaksanakan uji pengambilan dan pengujian kualitas air limbah guna mendukung kegiatan pengaduan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat bukti pencemaran, serta pelayanan pengambilan dan pengujian kualitas air limbah industri (ALI) pada 59 perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan;
9. Tahun 2024 menghasilkan PAD yang bersumber dari retribusi Pemanfaatan Aset untuk Uji Kualitas Lingkungan sejumlah Rp. 577.301.806,-.

B. Potensi dan Peluang

Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi dan peluang untuk peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi Pemanfaatan Aset untuk Uji Kualitas Lingkungan dari sektor uji air maupun uji emisi (gas buang) sumber bergerak (kendaraan bermotor) maupun sumber tidak bergerak (cerobong dan genset), yaitu:

1. Jumlah perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang memiliki izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kurang lebih 1.535 perusahaan;
2. Terdapat best practice regulasi pengelolaan lingkungan yang dapat diadopsi untuk peningkatan kinerja DLH dan PAD Kab. Pasuruan yaitu Provinsi DKI Jakarta berupa:
 - 1) Regulasi yang mewajibkan uji kualitas emisi / gas buang kendaraan bermotor (berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor);
 - 2) Regulasi yang mewajibkan Perusahaan di wilayah administrasinya menggunakan Laboratorium yang dikelola Pemprov dalam melakukan kewajiban pengujian air limbah (berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha).

C. Usulan Pengembangan

Rencana pengembangan yang diusulkan, yaitu:

1. Tahun 2025 mendapatkan sertifikat terregistrasi “Laboratorium Lingkungan” dari KLH/BPLH sebagai syarat wajib untuk dapat melakukan uji kualitas air limbah dan udara;
2. Penambahan jumlah personel guna pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel air, air limbah, dan udara sebanyak 4 (empat) orang dengan kualifikasi Pendidikan minimal D3 Teknik Kimia atau analis kimia dan 11 (sebelas) orang analis uji parameter lingkungan dengan kualifikasi Pendidikan SMK Kimia/Kimia/Kimia Industri, dan 5 (lima) orang Petugas Pengambil Contoh Uji;

3. Mengoptimalkan dan menambah sarana serta prasarana, alat dan bahan untuk menambah pelayanan uji air sebanyak 20 parameter, sehingga total parameter yang bisa dilayani sebanyak 49 parameter;
4. Melakukan perluasan ruang lingkup pengujian kualitas air dan air limbah berupa parameter kimia (18 Parameter) dan mikrobiologi (2 parameter);
5. Penambahan ruang lingkup parameter uji udara yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2028 atau 2029;
6. Berpotensi menyumbang PAD sebesar Rp 600 Juta (tahun 2026), Rp750 Juta (tahun 2027), Rp 1 Miliar(tahun 2028) dan Rp1,3 Miliar (tahun 2029);
7. Melakukan analisa potensi pengembangan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		
													I		II		III		IV														
1	2	3		4	5			6		7			8		9			10		11		12				13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12				15 = 14/5 x 100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			7/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	Rp32.663.308			3	laporan	Rp15.805.000	0	Rp4.673.700						0	Rp4.673.700	-	30	0	Rp4.673.700	0	14						
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	%	Rp11.910.435.002,00			100	%	Rp13.664.214.924,00	100	Rp2.617.668.437,00	100	Rp1.350.823.863	0	-	0	-	100	Rp3.968.492.300,00	100	29	100	Rp3.968.492.300,00	100	33					
			8/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/bulan	Rp7.934.849.671,00			73	orang/bulan	Rp12.925.077.840,00	73	Rp2.396.123.287,00	73	Rp1.201.708.863	0	-	0	-	146	Rp3.597.832.150,00	200	28	146	Rp3.597.832.150,00	182,5	45					
			9/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dokumen	Rp3.906.909.207,00			36	dokumen	Rp708.437.284	9	Rp215.604.150	9	Rp146.221.100	0	-	0	-	18	Rp361.825.250	50	51	18	Rp361.825.250	50	9					
			10/ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	dokumen	Rp15.869.699			6	dokumen	Rp9.699.800	1	Rp2.010.000	2	Rp2.893.900					3	Rp4.903.900	50	51	3	Rp4.903.900	50	31					
			11/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19	laporan	Rp38.404.672			19	laporan	Rp21.000.000	4	Rp3.931.000			0	-	0	-	4	Rp3.931.000	21	19	4	Rp3.931.000	21,05	10					
			12/ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	2	dokumen	Rp14.401.752													0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0						
			3/ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp62.407.593			100	%	Rp15.482.480					0	-	0	-	0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0					
			13/ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	Rp19.202.336			6	dokumen	Rp15.482.480					0	-	0	-	0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0					
			14/ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	dokumen	Rp43.205.256													0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0						
			4/ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	Rp190.376.762			100	%	Rp25.070.000	25	Rp1.600.000	25	Rp2.560.000	0	-	0	-	50	Rp4.160.000	50	17	50	Rp4.160.000	50	2					
			15/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	Rp53.017.650			20	orang	Rp25.070.000	3	Rp1.600.000	2	Rp2.560.000	0	-	0	-	5	Rp4.160.000	25	17	5	Rp4.160.000	25	8					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)											
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355 unit		Rp137.359.111									0		Rp-			0		Rp-	0	0								
		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100 %		Rp1.525.169.715	100 %	Rp295.876.700	100	Rp28.105.647	100	Rp57.891.751	0	-	0	-	100	Rp85.997.398	100	29	100	Rp85.997.398	100	6								
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket		Rp336.167.626	5	paket		Rp5.999.000	1						1		Rp1.000.000	20	17	1		Rp1.000.000	2,08	0						
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		Rp542.900.992	6	paket		Rp32.349.000		2					2		Rp16.357.000	33	51	2		Rp16.357.000	33,33	3						
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket		Rp48.005.841	20	paket		Rp24.970.000		1					1		Rp10.573.500	5	42	1		Rp10.573.500	12,5	22						
		20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket		Rp60.120.685	9	paket		Rp15.735.000	2				0	-	0	-	2		Rp3.600.000	22	23	2		Rp3.600.000	22,22	6				
		21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket		Rp81.554.242	12	paket		Rp50.673.700	3				Rp1.050.000	0	-	0	-	3		Rp8.165.000	25	16	3		Rp8.165.000	25	10			
		22	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket		Rp38.404.672											0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0						
		23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		Rp49.080.403	12	laporan		Rp19.170.000	6				Rp3.359.100	1			Rp1.384.071				7		Rp4.743.171	58	25	7		Rp4.743.171	58,33	10
		24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		Rp368.935.254	12	laporan		Rp146.980.000	3				Rp13.031.547	3			Rp28.527.180				6		Rp41.558.727	50	28	6		Rp41.558.727	50	11
		6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100 %		Rp1.488.153.059	100 %	Rp30.169.495						0	-	0	-	0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0					
		25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		Rp498.986.916											0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0						
		26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		Rp495.144.721											0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0						
		27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	10 unit		Rp108.845.658	0	unit		Rp -					0	-	0	-	0		Rp-		0		Rp-	0	0					
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit		Rp35.213.436	3			Rp26.851.495					0	-	0	-	0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0				
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 unit		Rp349.962.328	18	unit		Rp3.318.000							0		Rp-	-	-	0		Rp-	0	0						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)																	
										I				II												III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	Rp416.572.167			100	%	Rp157.562.000			100	%	Rp20.555.987			100	%	Rp13.054.220			0	-	0	-	100	%	Rp33.610.207			100	%	Rp33.610.207			100	%	Rp33.610.207
		30	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	Rp336.167.627			48	laporan	Rp156.800.000			12		Rp20.555.987			12		Rp13.054.220			0	-	0	-	24		Rp33.610.207			50		21		24		Rp33.610.207	
		31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	laporan	Rp80.404.541			5	laporan	Rp762.000						0	-	0	-	0			Rp-	-	-	0			Rp-	-	-	0			0		0		0
		8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%	Rp722.801.349			100	%	Rp459.325.296			50		Rp72.820.700			20%		Rp62.876.200			0	-	0	-	5020%		Rp135.696.900			50		30		####		Rp135.696.900	
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	Rp436.509.734			6	unit	Rp435.337.296			3		Rp64.449.700			1		Rp62.876.200							4		Rp127.325.900			67		29		4		Rp127.325.900	
		33	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	unit	Rp1.108.935			12	unit	Rp100.000					Rp-								0					0		Rp-	-	-	0			Rp-	-	-	0
		34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	Rp35.751.534			8	unit	Rp13.250.000					Rp-								0					0		Rp-	-	-	0			Rp-	-	-	0
		35	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Rp213.469.971			2	unit	Rp2.376.000			2		Rp2.371.000				0	-	0	-	2					2		Rp2.371.000			100		100		2		Rp2.371.000
		36	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Rp35.961.175			2	unit	Rp8.262.000			1		Rp6.000.000				0	-	0	-	1					1		Rp6.000.000			50		73		1		Rp6.000.000
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67	%	Rp655.601.173			66,67	%	Rp124.657.550			16,7		Rp-								16,67					16,67		Rp-	-	-	16,7			Rp-	-	-	16,7
		9	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	66,1	%	Rp655.601.173			62,71	%	Rp112.351.650			15,7		Rp-								15,68					15,68		Rp-	-	-	15,7			Rp-	-	-	15,7
		37	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	dokumen	Rp366.751.561			1	dokumen	Rp100.885.550			0		Rp-								0					0		Rp-	-	-	0			Rp-	-	-	0
		38	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir	1	dokumen	Rp288.849.612			3	dokumen	Rp11.466.100			0		Rp-								0					0		Rp-	-	-	0			Rp-	-	-	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I				II													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		39	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	55,56	%			60	%	Rp12.305.900	15		Rp-					15		Rp-	25	-	15		Rp-	26,998	0
		39	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen					Rp-	0		Rp-					0		Rp-	####	####	0		Rp-	0	0
		40	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	2	dokumen		Rp495.687.840	2	dokumen	Rp12.305.900																	
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	60	%		Rp2.652.939.270,00	60	%	Rp741.273.340	15		Rp79.568.115	15		Rp81.270.472		30		Rp160.838.587	50	22	30		Rp160.838.587	50	6
			Persentase meningkatnya luas lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan terdegradasi	65	%			50	%		12,5			12,5				25		Rp-	50	-	25		Rp-	38,46	0
		11	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100	%		Rp1.782.843.369	100	%	Rp689.733.340	25		Rp74.440.115	3		Rp76.124.972		28		Rp150.565.087	28	22	28		Rp150.565.087	28	8
			Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	100	%			80	%		10							10		Rp-	13	-	10		Rp-	10	0
		41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	119	dokumen		Rp416.164.414	120	dokumen	Rp147.891.500			Rp3.538.500			Rp1.828.900		0		Rp5.367.400	-	4	0		Rp5.367.400	0	1
		42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5	dokumen		Rp161.422.531	4	dokumen	Rp12.626.700	0		Rp283.800			Rp322.500		0		Rp606.300	-	5	0		Rp606.300	0	0
		43	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1254	dokumen		Rp1.205.256.424	1204	dokumen	Rp529.215.140	214		Rp70.617.815	141		Rp73.973.572		355		Rp144.591.387	29	27	355		Rp144.591.387	28,31	12

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I				II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		## Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	7	%	Rp403.185.752		6	%	Rp29.933.300	1,5	Rp5.128.000			Rp -			1,5	Rp5.128.000	25	17	1,5	Rp5.128.000	21,43	1
		44 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	70	laporan	Rp368.598.739		60	laporan	Rp29.266.900	5	Rp5.128.000						5	Rp5.128.000	8	18	5	Rp5.128.000	7,14	1
		45 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4	titik	Rp34.587.013		4	titik	Rp666.400								0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		## Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	%	Rp466.910.149		29	%	Rp21.606.700		Rp -			Rp5.145.500			0	Rp5.145.500	-	24	0	Rp5.145.500	0	1
		46 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Usur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2	kegiatan	Rp24.705.009												0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		47 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota	2	kegiatan	Rp31.622.412												0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
		48 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	16	kegiatan	Rp378.960.316		12	kegiatan	Rp21.606.700	0	Rp -	2		Rp5.145.500			2	Rp5.145.500	17	24	2	Rp5.145.500	12,5	1
		49 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2	kegiatan	Rp31.622.412												0	Rp -	-	-	0	Rp -	0	0
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	9,9	%	Rp4.636.834.851,00		9,35	%	Rp1.745.781.850	0	Rp385.600.802			Rp253.264.000			0	Rp638.864.802	-	37	0	Rp638.864.802	0	14
		## Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	22,22	%	Rp4.636.834.851,00		17,65	%	Rp1.745.781.850		Rp385.600.802			Rp253.264.000			0	Rp638.864.802	-	37	0	Rp638.864.802	0	14

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		50	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Kehati yang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang	1	dokumen	Rp3.801.190.281,00			1	dokumen	Rp5.287.500			Rp1.485.000			0	Rp1.485.000	-	28	0	Rp1.485.000	0	0		
		51	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	15	ha	Rp84.470.895											0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0		
		52	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	900	ha	Rp751.173.674			850	Ha	Rp1.740.494.350			Rp385.600.802			0	Rp637.379.802	-	37	0	Rp637.379.802	0	85		
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pendampingan/pe mbinaan/sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 diwilayah kabupaten pasuruan	100	%	Rp621.694.594		67	%	Rp30.219.340	16,8	Rp6.073.200			Rp3.125.500			16,75	Rp9.198.700	25	30	16,8	Rp9.198.700	16,75	1		
		##	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100	%	Rp219.848.065			100	%	Rp23.292.983	38,3	Rp4.658.200			Rp3.125.500			38,33	Rp7.783.700	38	33	38,3	Rp7.783.700	38,33	4
		53	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30	dokumen	Rp119.523.819			30	dokumen	Rp2.815.342	11	Rp671.700				11	Rp671.700	37	24	11	Rp671.700	36,67	1		
		54	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30	dokumen	Rp100.324.247			30	laporan	Rp20.477.641	12	Rp3.986.500	10	Rp3.125.500			22	Rp7.112.000	73	35	22	Rp7.112.000	73,33	7	
		##	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengumpulan limbah B3 di wilayah Kabupaten	100	%	Rp401.846.529			100	%	Rp6.926.357	25	Rp1.415.000			Rp-		25	Rp1.415.000	25	20	25	Rp1.415.000	25	0	
		55	fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	dokumen	Rp4.108.570			1	dokumen	Rp2.000.232			Rp-			0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		56	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan	3	dokumen	Rp397.737.959			3	dokumen	Rp4.926.125	1	Rp1.415.000				1	Rp1.415.000	33	29	1	Rp1.415.000	33,33	0
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	40	%	Rp1.155.880.330			47	%	Rp117.184.700	11,8	Rp19.038.385		Rp6.652.500		11,75	Rp25.690.885	25	22	11,8	Rp25.690.885	29,375	2
		##	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	17,52	%	Rp1.155.880.330			16,38	%	Rp117.184.700	4,09	Rp19.038.385		Rp6.652.500		4,09	Rp25.690.885	25	22	4,09	Rp25.690.885	23,345	2
		57	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	45	dokumen	Rp520.612.067			0	dokumen	Rp -	0	Rp -				0	Rp -	####	####	0	Rp -	0	0
		58	Pengawasan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan keselamatan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	17	badan usaha	Rp560.226.378			16	badan usaha	Rp104.654.700	1	Rp15.845.885		Rp6.652.500		1	Rp22.498.385	6	21	1	Rp22.498.385	5,88	4
		59	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6	orang	Rp39.793.606			6	orang	Rp12.530.000	1	Rp3.192.500				1	Rp3.192.500	17	25	1	Rp3.192.500	16,67	8

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		I				II																				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5			6			7				8				9				10				11				12				13 = 12/7 x 100%				14 = 6+12				15 = 14/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	17	dokumen		Rp35.248.279												0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		## Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	103	Rp468.655.083			95	Rp100.908.900	24	Rp3.036.300		Rp774.000					24	Rp3.810.300	25	4	24	Rp3.810.300	23,3	1
		63 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Rp468.655.083			4	Rp100.908.900	1	Rp3.036.300		Rp774.000					1	Rp3.810.300	25	4	1	Rp3.810.300	25	1
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filant rophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	3,4	%	Rp152.132.242		3,17	%	Rp44.064.400								0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0
		## Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filant rophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	5,28	%	Rp152.132.242		4,93	%	Rp44.064.400								0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0
		64 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	entitas	Rp152.132.242		4	entitas	Rp44.064.400								0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	##	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya ketataan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	100	%	Rp160.318.551		100	%	Rp108.714.700	100	Rp9.263.000						100	Rp9.263.000	100	9	100	Rp9.263.000	100	6
		## Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%	Rp160.318.551		100	%	Rp108.714.700	100	Rp9.263.000						100	Rp9.263.000	100	9	100	Rp9.263.000	100	6

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		65	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 dokumen	Rp127.541.957		12	pengaduan	Rp73.544.500	7	Rp6.834.000						7	Rp6.834.000	58	9	7	Rp6.834.000	46,67	5
		66	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan	15 dokumen	Rp32.776.594		6	perkara	Rp35.170.200	1	Rp2.429.000						1	Rp2.429.000	17	7	1	Rp2.429.000	6,67	7
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	##	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	82	%	Rp21.774.889.208,00		78	%	Rp6.907.474.100,00	19,8	Rp1.345.754.764	19,8	Rp1.133.942.524			39,66	Rp2.479.697.288,00	51	36	39,7	Rp2.479.697.288,00	48,37	11
				Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	54,9	%			43,7	%		8,03		8,03			16,06	Rp-	37	-	16,1	Rp-	29,25	0	
		##	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	24,6	%	Rp21.774.889.208,00		23,4	%	Rp6.907.474.100,00	5,85	Rp1.345.754.764	5,85	Rp1.133.942.524			11,7	Rp2.479.697.288,00	50	36	11,7	Rp2.479.697.288,00	47,561	11
				Persentase capaian penanganan sampah	38,4	%			30,6	%		7,65		7,65			15,3	Rp-	50	-	15,3	Rp-	39,844	0	
		67	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	33 kelompok	Rp300.108.056		33	kelompok	Rp8.710.000	9	Rp8.437.000						9	Rp8.437.000	27	97	9	Rp8.437.000	27,27	3
		68	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk	1 dokumen	Rp28.937.389		1	dokumen	Rp12.060.000							0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0	
		69	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	18 unit	Rp10.814.709.187,00		12	unit	Rp42.935.000	0	Rp-						0	Rp-	-	-	0	Rp-	0	0

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2024 adalah 1.678.474 Jiwa. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau $\pm 7,0\%$ dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau $\pm 5\%$, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau $\pm 7,0\%$ dan sisanya sebesar $\pm 81\%$ atau 924 ton/hari tidak dikelola.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, jumlah timbunan sampah selama tahun 2024 mencapai 0,7 kg /hari atau 428.850.107 kg /tahun. Kapasitas pengolahan akhir sampah eksisting di TPA Wonokerto sebesar 218.948,15 m³ /hari, dengan sistem Control Landfill dengan luas area awal yang disediakan yaitu 4,587 ha.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

2. Bencana Banjir

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada di daerah pesisir merupakan daerah rawan banjir, yaitu meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejos, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Lekok. Kondisi dalam resiko bencana, yaitu kondisi bencana tanah longsor dan gempa bumi.

Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun.

Berdasarkan data penggunaan lahan dapat diketahui luas total lahan yang tidak tertutup adalah mencapai 124.206,96 m² atau sekitar 83,33%. Lahan yang tidak tertutup bangunan, seperti hutan, kebun campuran, lahan kosong, perkebunan, sawah, semak belukar, taman kota dan tegalan/ ladang. Capaian nilai IKTL Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 45,64 termasuk dalam kategori “kurang”. Nilai IKTL pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,12 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 46,76.

Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

4. Pencemaran Badan Air Permukaan

Potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Saat ini tercatat sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 (sembilan) DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur Nilai IKA Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 56,98, sedangkan pada tahun 2024 nilai IKA mengalami kenaikan hingga 59,72.

5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 adalah 83,46 mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 80,52.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar karena keadaan lingkungan juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 adalah :

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan penjabaran ke dalam 8 Misi yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Demokrasi;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara;
3. Pengembangan Infrastruktur dan Lapangan Kerja;
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
5. Hilirisasi dan Pengembangan Industri;
6. Pembangunan dari Desa;
7. Reformasi Politik dan Hukum;
8. **Penyelarasan Kehidupan dengan Lingkungan;**

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasuruan menyinergikan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Dinas / Instansi / Organisasi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Masyarakat / Pemerhati / Komunitas pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
3. Masyarakat lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Industri / usaha / UMKM yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan atau perusak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Tujuan PD : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						
		Indikator : Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKU	Persen	0,64	2,26	2,26	Tetap
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Indikator 1: Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	IKU	Persen	12,5	12,5	12,5	Tetap
		Indikator 2: Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	IKU	Persen	56,2	64,55	64,55	Tetap
		Indikator 3: Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	IKU	Persen	76,6	76,6	76,6	Tetap
		Indikator 4: Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	IKU	Persen	80,4	80,4	80,4	Tetap
		Sasaran PD 2 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah						
		Indikator : Nilai Sakip DLH	IKU	Poin	83,2	88	88	Tetap

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
							Awal	Perubahan	
1		2		3	4	5	6	7	8
			Indikator SPM/IKK						
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan			Poin	65,06	62,741	62,741	Tetap
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)		a. Indeks Kualitas Air (IKA)	IKK	Poin	59,72	53,62	53,62	Tetap
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKK	Poin	80,52	81,1	81,1	Tetap
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKK	Poin	45,64	43,55	43,55	Tetap
	2. Terlaksananya Pengelolaan Smapah di Wilayah Kabupaten	2. Terlaksananya Pengelolaan Smapah di Wilayah Kabupaten			Persen	35,93	54	54	Tetap
	a. Tersedianya data dan informasi penananganan sampah diwilayah kabupaten/kota		a. Tersedianya data dan informasi penananganan sampah diwilayah kabupaten/kota	IKK	Persen	12	10	10	Tetap

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
							Awal	Perubahan	
1		2		3	4	5	6	7	8
	3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten/kota	3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten/kota			Persen	77,78	53.33	53.33	Tetap
	a. Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		a. Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	IKK	Persen	100	100	100	Tetap
	b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	IKK	Persen	5,88	0.13	0.13	Tetap
	c. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		c. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	IKK	Persen	0	83	83	Tetap
	d. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		d. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	IKK	Persen	0	25	25	Tetap
	e.Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		e.Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	IKK	Persen	100	100	100	Tetap

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
							Awal	Perubahan	
1		2		3	4	5	6	7	8
	f. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampakmya didaerah kabupaten/kota yang ditangani		f. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampakmya didaerah kabupaten/kota yang ditangani	IKK	Persen	100	100	100	Tetap

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 akan dilakukan melalui 1 program penunjang dan 10 program utama, 23 kegiatan dan 57 sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2024- 2026.

3.2.1 Prioritas 2025

I. Pembenahan / Penataan TPA Wonokerto

Mengacu pada *draft* Keputusan Bupati Pasuruan tentang Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pasuruan. Dalam peta jalan tersebut terdapat upaya pembenahan TPA Wonokerto pada tahun 2025. Pembenahan yang dilakukan yaitu:

- a. Peminjaman alat berat (Excavator) dari Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sejumlah satu unit untuk mengoptimalkan penataan sampah di TPA Wonokerto;
- b. Pengadaan tanah urug, untuk memenuhi standar pengelolaan sampah di TPA (*controlled sanitary landfill*);
- c. Pengadaan bibit tanaman sebagai *green belt* atau sabuk hijau dari TPA;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembenahan TPA Wonokerto sebagai dasar perencanaan pembenahan untuk tahun depan.

Pembenahan TPA Wonokerto ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub. Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan Sub kegiatan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.

II. Pengelolaan Persampahan di Lekok

Potensi timbulan sampah di Lekok yaitu 55 ton/hari dengan perkiraan sampah dari sumber 25 ton/hari dan sampah masuk ke TPS 3R 30 ton/hari. Dengan data tersebut diatas Dinas lingkungan Hidup perlu untuk menangani sampah secara lebih efektif yaitu dengan berbagai alternatif. Alternatif 1 dengan pemilahan manual 60% dan mesin gibrig 40% dengan kapasitas 10-15 ton dan alternatif ke 2 yaitu RDF yang mempunyai dampak positif padat karya, anorganik layak jual, kompos dan residu tertangani. Pengelolaan persampahan di Lekok ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui Pendaaurulangan Sampah.

III. Revitalisasi Alun-alun Bangil dan Alun-alun Wonorejo

Program prioritas Bupati Pasuruan salah satunya adalah penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dana tau Taman Bermain di setiap Kecamatan. Alun-alun Bangil dan Alun-alun Wonorejo merupakan salah satu *icon* atau penanda dari Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai sarana rekreasi warga masyarakat dan pengatur ekologis.

Revitalisasi Alun-alun Bangil telah sebagian dilakukan tahun 2024, namun di tahun 2025 dilakukan kajian kembali dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan Alun-alun Bangil, serta dilakukan perencanaan juga untuk peningkatan optimalisasi Alun-alun Wonorejo. Revitalisasi Alun-alun Bangil dan Wonorejo dilaksanakan melalui Penanganan Sampah melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

IV. Pengendalian pencemaran limbah kotoran hewan di Rowogempol Lekok

Pencemaran limbah kotoran hewan di Rowogempol Lekok telah menjadi perhatian dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dimana Peternak di wilayah Kecamatan Lekok pada umumnya membuang kotoran ternaknya langsung ke sungai atau ke

saluran air terdekat. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan belum tersedianya fasilitas IPAL Komunal yang memadai dan berfungsi secara optimal. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup menyusun strategi pengendalian limbah ternak yaitu dengan penghentian sumber pencemar, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah dan pengolahan limbah yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi.

V. Optimalisasi UPT Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar untuk menunjang penambahan PAD dengan memperbanyak pelanggan dari layanan kesehatan Kabupaten Pasuruan dimana memiliki 2 RSUD dan 33 Puskesmas serta layanan kesehatan swasta lainnya. Keberhasilan pelaksanaan rencana pengembangan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana. UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup berharap ada peran serta dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar layanan kesehatan dan customer lainnya bisa mengujikan limbahnya dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3.2.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota:
 1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:
 - 4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - 5. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:
 - 7. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
 - 8. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:
 - 9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi.

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota:
 - 10. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
 - 11. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:
 - 12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

13. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

14. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

15. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

16. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

17. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

J. Kegiatan Pengakuan MHA, karifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:

18. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA karifan lokal atau pengetahuan tradisional dan HAK kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH;

K. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

19. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH;

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- L. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
20. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- M. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
21. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- N. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:
22. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
23. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

X. Program Pengelolaan Persampahan

- O. Kegiatan Pengelolaan Sampah:
24. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
25. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
26. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
27. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
28. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

29. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah;
30. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

P. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

31. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
32. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
33. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
34. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
35. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Q. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

38. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
39. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
40. Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
41. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

R. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

42. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD

S. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

43. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

T. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

44. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

45. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
47. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
48. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
49. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
50. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- U. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 51. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 52. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 53. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- W. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 54. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 55. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 56. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 57. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 58. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

TABEL 3.2													
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025													
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp124.657.550	Rp110.189.850	66,67	%	66,67	%	16,67%	Rp -	
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Rp112.351.650	Rp101.682.050	62,71	%	62,71	%	15,68%	Rp -	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 19 Kemudahan Perizinan Berusaha dan Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Rp100.885.550	Rp94.101.750	3	dokumen	3	dokumen		Rp -	
	Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal		Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Rp11.466.100	Rp7.580.300	1	dokumen	1	dokumen		Rp -	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Rp12.305.900	Rp8.507.800	66,67	%	66,67	%	15%	Rp -	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Rp -	Rp -						Rp -	
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp12.305.900	Rp8.507.800	2	dokumen	2	dokumen		Rp -	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Rp741.273.340	Rp2.377.430.895,00	60	%	60	%	30%	Rp160.838.587	
							50	%	50	%	25,00%		
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp689.733.340	Rp2.132.722.695	100	%	57,44	%	28%	Rp150.565.087	
							80	%	20	%	10%		
		PROGRAM PRIORITAS NO. 19 Kemudahan Perizinan Berusaha dan Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Rp147.891.500	Rp132.809.500	120	dokumen	54	dokumen		Rp5.367.400	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 10 Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani PROGRAM PRIORITAS NO. 12 IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp12.626.700	Rp7.777.800	4	dokumen	1	dokumen		Rp606.300	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp529.215.140	Rp1.992.135.395	1204	dokumen	1204	dokumen	355 dokumen	Rp144.591.387	
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp29.933.300	Rp25.862.200	6	%	6	%	1,50%	Rp5.128.000	
	Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp29.266.900	Rp25.200.900	60	laporan	20	laporan	5 laporan	Rp5.128.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp666.400	Rp661.300	4	titik	2	titik		Rp -	
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp21.606.700	Rp218.846.000	29	%	29	%		Rp5.145.500	
	Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal		Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Rp21.606.700	Rp218.846.000	12	kegiatan	12	kegiatan	2 kegiatan	Rp5.145.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI	Rp1.745.781.850	Rp3.029.251.321,00	9,35	%	9,35	%		Rp638.864.802	
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp1.745.781.850	Rp3.029.251.321,00	17,65	%	17,65	%		Rp638.864.802	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp5.287.500	Rp5.287.500	1	dokumen	1	dokumen		Rp1.485.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	PROGRAM PRIORITAS NO. 14 Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir PROGRAM PRIORITAS NO. 24 RTH dan atau taman bermain di setian	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp1.740.494.350	Rp3.023.963.821,00	850	850 Ha	850	850 Ha		Rp637.379.802	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp30.219.340	Rp21.526.224	67	%	67	%	16,75%	Rp9.198.700	
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp23.292.983	Rp16.599.983	100	%	100	%	38,33%	Rp7.783.700	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp2.815.342	Rp1.602.342	30	dokumen	30	dokumen	11 dokumen	Rp671.700	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp20.477.641	Rp14.997.641	30	laporan	15	laporan	22 laporan	Rp7.112.000	
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Rp6.926.357	Rp4.926.241	100	%	100	%	25%	Rp1.415.000	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp2.000.232	Rp1.000.116	1	dokumen	1	dokumen		Rp -	
			Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	Rp4.926.125	Rp3.926.125	3	dokumen	2	dokumen	1 dokumen	Rp1.415.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp117.184.700	Rp89.156.700	47	%	47	%	11,75%	Rp25.690.885	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp117.184.700	Rp89.156.700	16,38	%	16,38	%	4,09%	Rp25.690.885	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp -	Rp -							
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rp12.530.000	Rp11.774.500	6	Orang	6	Orang	1 orang	Rp3.192.500	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp104.654.700	Rp77.382.200	16	badan usaha	8	badan usaha	1 dokumen	Rp22.498.385	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp28.178.000	Rp26.537.700	33	%	33	%		Rp2.808.000	
			Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp14.088.900	Rp12.454.900	1	lembaga	1	lembaga		Rp2.808.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Rp14.088.900	Rp12.454.900	10	dokumen	10	dokumen	5 dokumen	Rp2.808.000	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp14.089.100	Rp14.082.800	3	lembaga	3	lembaga		Rp -	
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp14.089.100	Rp14.082.800	3	dokumen	3	dokumen		Rp -	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp100.908.900	Rp70.084.900	7,54	%	7,54	%		Rp3.810.300	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp100.908.900	Rp70.084.900	95	lembaga	95	lembaga	24 lembaga	Rp3.810.300	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp100.908.900	Rp70.084.900	4	dokumen	4	dokumen	1 dokumen	Rp3.810.300	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp44.064.400	Rp42.880.400	3,17	%	3,17	%		Rp -	
			Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp44.064.400	Rp42.880.400	4,93	%	4,93	%		Rp -	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp44.064.400	Rp42.880.400	4	entitas	4	entitas		Rp -	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp108.714.700	Rp87.564.100	100	%	100	%	100%	Rp9.263.000	
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Rp108.714.700	Rp87.564.100	100	%	100	%	100%	Rp9.263.000	
			Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Rp73.544.500	Rp61.329.000	12	pengaduan	12	pengaduan	7 pengaduan	Rp6.834.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
			Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp35.170.200	Rp26.235.100	6	perkara	6	perkara	1 perkara	Rp2.429.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp6.907.474.100,00	Rp8.118.980.487,00	78	%	78	%	39,66%	Rp2.479.697.288,00	
							43,7	%	43,7	%	16,06%		
							23,4	%	23,4	%	11,70%		
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp6.907.474.100,00	Rp8.118.980.487,00	30,6	%	30,6	%	15,30%	Rp2.479.697.288,00	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 9 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rp40.355.013	Rp38.521.500	2	dokumen	2	dokumen	1 dokumen	Rp4.427.400	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 9 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Pengurangan Sampah Melalui Pendauren Ulang Sampah	Pengurangan Sampah Melalui Pendauren Ulang Sampah	Rp242.623.645	Rp986.854.745	99.683	ton	99.683	ton	49842 ton	Rp96.264.700	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 10 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyanggah cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegestor, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegestor, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp97.665.000	Rp -	127.798	ton				Rp -	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 11 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyanggah cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp6.403.921.442,00	Rp6.570.695.242,00	12	unit	12	unit	6 unit	Rp2.347.361.500,00	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	PROGRAM PRIORITAS NO. 12 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	Rp59.204.000	Rp459.204.000	8591	ton	8591	ton	4294 ton	Rp23.206.688	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 13 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp8.710.000	Rp8.710.000	33	kelompok	33	kelompok	9 kelompok	Rp8.437.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNA N DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN BAB V P-RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN		KINERJA	ANGGARAN	
		PROGRAM PRIORITAS NO. 14 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp12.060.000	Rp12.060.000	1	dokumen	1	dokumen		Rp -	
	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	PROGRAM PRIORITAS NO. 15 Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Rp42.935.000	Rp42.935.000	12	unit	12	unit		Rp -	

Tabel 3...																	
Tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025																	
KABUPATEN : PASURUAN																	
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup																	
NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025					SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												Pergeseran 1 + Refocusing				
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup																
	UNSUR PENDUKUNG																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	Rp9.582.663.720,00	100	%	Rp14.721.933.295,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100	%	Rp11.383.928.608,00	DAU	-	-3.338.004.687	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen	100%	Rp3.391.200,00	100	%	Rp74.232.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen	100	%	Rp42.724.900,00	DAU	-	-31.507.500	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp1.720.900,00	3	dokumen	Rp37.852.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	Rp13.633.700,00	DAU	-	-24.218.700	Efisiensi Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp183.600,00	2	dokumen	Rp7.850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	Rp5.653.700,00	DAU	-	-2.196.300	Efisiensi Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp122.400,00	2	dokumen	Rp5.275.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	Rp3.475.000,00	DAU	-	-1.800.000	Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025						SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dokumen	Rp165.300,00	2	dokumen	Rp1.675.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	dokumen	Rp1.675.000,00	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp97.800,00	2	dokumen	Rp1.675.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	dokumen	Rp1.675.000,00	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp122.400,00	4	laporan	Rp4.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	Rp3.725.000,00	DAU	-	-375.000	Efisiensi Anggaran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp978.800,00	3	laporan	Rp15.805.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	Rp12.887.500,00	DAU	-	-2.917.500	Efisiensi Anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	Rp9.408.196.105,00	100	%	Rp13.664.214.924,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungj awabkan	100	%	Rp10.583.367.230,00	DAU	-	-3.080.847.694	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	Rp8.710.363.221,00	73	orang/bulan	Rp12.925.077.840,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	orang/bulan	Rp9.521.065.046,00	DAU	-	-3.404.012.794	Pengurangan Gaji TPP P3K

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	Rp697.157.284,00	36	dokumen	Rp708.437.284,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dokumen	Rp1.047.487.284,00	DAU	-	339.050.000	Tambahan Gaji Non ASN Admin kantor
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	Rp244.800,00	6	dokumen	Rp9.699.800,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	dokumen	Rp6.137.900,00	DAU	-	-3.561.900	Efisiensi Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	19 laporan	Rp430.800,00	19	laporan	Rp21.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semestera n SKPD	19	laporan	Rp8.677.000,00	DAU	-	-12.323.000	Efisiensi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp991.420,00	100	%	Rp15.482.480,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	%	Rp15.482.480,00	DAU	-	-	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	Rp991.420,00	6	dokumen	Rp15.482.480,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	Rp15.482.480,00	DAU	-4	-	Penyesuaian internal
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 dokumen	Rp -			Rp -	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Rp -	DAU	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp600.000,00	100	%	Rp25.070.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%	Rp15.070.000,00	DAU	-	-10.000.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp600.000,00	20	Orang	Rp25.070.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	Rp15.070.000,00	DAU	-13	-10.000.000	Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025					SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355 unit	Rp -			Rp -	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Rp -	DAU	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	Rp8.933.900,00	100	%	Rp295.876.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%	Rp186.007.250,00	DAU	-	-109.869.450	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp100.000,00	5	paket	Rp5.999.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	Rp8.999.000,00	DAU	-3	3.000.000	Penyesuaian internal
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp1.366.000,00	6	paket	Rp32.349.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	Rp21.645.500,00	DAU	-3	-10.703.500	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	Rp780.000,00	20	paket	Rp24.970.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	Rp12.485.000,00	DAU	-18	-12.485.000	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	Rp735.000,00	9	paket	Rp15.735.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	Rp5.000.000,00	DAU	-5	-10.735.000	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp1.144.900,00	12	paket	Rp50.673.700,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	Rp26.727.750,00	DAU	-	-23.945.950	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	Rp -			Rp -	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Rp -	DAU	-	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp520.000,00	12	laporan	Rp19.170.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	Rp19.170.000,00	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp4.288.000,00	12	laporan	Rp146.980.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	Rp91.980.000,00	DAU	-	-55.000.000	Efisiensi Anggaran
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi	100%	Rp7.818.495,00	100	%	Rp30.169.495,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi			Rp12.000.000,00	DAU	-100	-18.169.495	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Rp -			Rp -	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp -	DAU	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp4.500.495,00	3	unit	Rp26.851.495,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Rp -	DAU	-3	-26.851.495	Efisiensi Anggaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	Rp3.318.000,00	18	unit	Rp3.318.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	Rp12.000.000,00	DAU	-17	8.682.000	Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Internal
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp142.562.000,00	100	%	Rp157.562.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp111.562.000,00	DAU	-	-46.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	Rp141.800.000,00	48	laporan	Rp156.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	Rp110.800.000,00	DAU	-	-46.000.000	Penyesuaian internal

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025						SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp762.000,00	5	laporan	Rp762.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	Rp762.000,00	DAU	-4	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	Rp10.170.600,00	100	%	Rp459.325.296,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%	Rp417.714.748,00	DAU	-	-41.610.548	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp6.182.600,00	6	Unit	Rp435.337.296,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	Rp369.342.748,00	DAU	-	-65.994.548	Efisiensi Anggaran
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Rp100.000,00	12	Unit	Rp100.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	Rp100.000,00	DAU	-11	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp750.000,00	8	Unit	Rp13.250.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	Rp13.250.000,00	DAU	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp2.376.000,00	2	Unit	Rp2.376.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp23.760.000,00	DAU	-	21.384.000	Penyesuaian internal
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp762.000,00	2	Unit	Rp8.262.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp11.262.000,00	DAU	-	3.000.000	Penyesuaian internal
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan hidup yang berkualitas	66,67%	Rp7.007.650,00	66,67	%	Rp124.657.550,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67	%	Rp110.189.850,00	DAU	-	-14.467.700	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,71%	Rp3.270.450,00	62,71	%	Rp112.351.650,00	Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,71	%	Rp101.682.050,00	DAU	-	-10.669.600	
		Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kot a yang berisi arahan/muata n RPPLH kabupaten/kot a dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	3dokumen	Rp268.950,00	3	dokumen	Rp11.466.100,00	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	3	dokumen	Rp7.580.300,00	DAU	-	-3.885.800	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Ko ta	1 dokumen	Rp3.001.500,00	1	dokumen	Rp100.885.550,00	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1	dokumen	Rp94.101.750,00	DAU	-	-6.783.800	Efisiensi Anggaran
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	60,00%	Rp3.737.200,00	66,67	%	Rp12.305.900,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	66,67	%	Rp8.507.800,00	DAU	-	-3.798.100	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Ko ta yang	2 dokumen	Rp3.737.200,00	2	dokumen	Rp12.305.900,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	2	dokumen	Rp8.507.800,00	DAU	-	-3.798.100	Efisiensi Anggaran
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan udara	60%	Rp1.905.483.200,00	60	%	Rp741.273.340,00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan udara	60	%	Rp2.377.430.895,00	DAU	-	1.636.157.555	
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	50%		50	%			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	50	%		DAU	-		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP				
						TARGET IK	PAGU RP				TARGET IK			PAGU RP			
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	100%	Rp1.493.943.200,00	100	%	Rp689.733.340,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	57,44	%	Rp2.132.722.695,00	DAU	-43	1.442.989.355	
		Kabupaten/Kota	Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	80%		80	%			20	%	DAU		-60			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	120 dokumen	Rp1.420.074.500,00	120	dokumen	Rp147.891.500,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	54	dokumen	Rp132.809.500,00	DAU	-66	-15.082.000	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang	4 dokumen	Rp1.894.700,00	4	dokumen	Rp12.626.700,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	dokumen	Rp7.777.800,00	DAU	-3	-4.848.900	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1204 dokumen	Rp71.974.000,00	1204	dokumen	Rp529.215.140,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1220	dokumen	Rp1.992.135.395,00	DAU	16	1.462.920.255	Penambahan atensi Bupati untuk optimalisasi UPT Lab (terlampir)Penambahan atensi Bupati untuk optimalisasi UPT Lab (terlampir) Tambahan Gaji Non ASN Petugas Lab
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6%	Rp4.933.300,00	6	%	Rp29.933.300,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2	%	Rp25.862.200,00	DAU	-4	-4.071.100	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	60 laporan	Rp4.266.900,00	60	laporan	Rp29.266.900,00	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	20	laporan	Rp25.200.900,00	DAU	-40	-4.066.000	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	Rp666.400,00	4	titik	Rp666.400,00	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2	titik	Rp661.300,00	DAU	-2	-5.100	Efisiensi Anggaran
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	29%	Rp406.606.700,00	29	%	Rp21.606.700,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	29	%	Rp218.846.000,00	DAU	-	197.239.300	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan	kegiatan	Rp -			Rp -	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			Rp -	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Rp -			Rp -	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			Rp -	DAU	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 kegiatan	Rp406.606.700,00	12	kegiatan	Rp21.606.700,00	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12	kegiatan	Rp218.846.000,00	DAU	-	197.239.300	Tambahan atensi Bupati Pengendalian pencemaran limbah kotoran hewan di Rowogempol Lekok

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Rp -			Rp -	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan			Rp -	DAU	-	-	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	9,35%	Rp7.417.684.597,00	9,35	%	Rp1.745.781.850,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	9,35	%	Rp3.029.251.321,00	DAU	-	1.283.469.471	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	17,65%	Rp7.417.684.597,00	17,65	%	Rp1.745.781.850,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	17,65	%	Rp3.029.251.321,00	DAU	-	1.283.469.471	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	Rp2.300.000,00	1	dokumen	Rp5.287.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	dokumen	Rp5.287.500,00	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	850 Ha	Rp7.415.384.597,00	850	850 Ha	Rp1.740.494.350,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	850	850 Ha	Rp3.023.963.821,00	PAT	-	1.283.469.471	Penambahan atensi Bupati (DED Alun2 Bangil dan DED Alun2 Wonorejo)Penambahan atensi Bupati (DED Alun2 Bangil dan DED Alun2 Wonorejo) Tambahan Gaji Non ASN Petugas Pertamanan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Pendampingan/Pembinaan /Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	67%	Rp5.201.840,00	67	%	Rp30.219.340,00	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Pendampingan /Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	67	%	Rp21.526.224,00	DAU	-	-8.693.116	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100%	Rp3.275.483,00	100	%	Rp23.292.983,00	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100	%	Rp16.599.983,00	DAU	-	-6.693.000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025			P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30 dokumen	Rp2.815.342,00	30	dokumen	Rp2.815.342,00	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30	dokumen	Rp1.602.342,00	DAU	-	-1.213.000	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	30 laporan	Rp460.141,00	30	laporan	Rp20.477.641,00	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	laporan	Rp14.997.641,00	DAU	-15	-5.480.000	Efisiensi Anggaran
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100%	Rp1.926.357,00	100	%	Rp6.926.357,00	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%	Rp4.926.241,00	DAU	-	-2.000.116	
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	Rp44.232,00	1	dokumen	Rp2.000.232,00	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	Rp1.000.116,00	DAU	-	-1.000.116	Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	3 dokumen	Rp1.882.125,00	3	dokumen	Rp4.926.125,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan	2	dokumen	Rp3.926.125,00	DAU	-1	-1.000.000	Efisiensi Anggaran
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungan wab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	47%	Rp7.616.321,00	47	%	Rp117.184.700,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran penanggungan ab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	47	%	Rp89.156.700,00	DAU	-	-28.028.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	16%	Rp7.616.321,00	16,38	%	Rp117.184.700,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	15,64	%	Rp89.156.700,00	DAU	-1	-28.028.000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 dokumen	Rp2.386.921,00			Rp -	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Rp -	DAU	-	-	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang	Rp574.500,00	6	Orang	Rp12.530.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Orang	Rp11.774.500,00	DAU	-	-755.500	Efisiensi Anggaran
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	16 Badan Usaha	Rp4.654.900,00	16	badan usaha	Rp104.654.700,00	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	8	badan usaha	Rp77.382.200,00	DAU	-8	-27.272.500	Efisiensi Anggaran
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	33%	Rp1.028.400,00	33	%	Rp28.178.000,00	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	33	%	Rp26.537.700,00	DAU	-	-1.640.300	
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	1 lembaga	Rp612.000,00	1	lembaga	Rp14.088.900,00	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	1	lembaga	Rp12.454.900,00	DAU	-	-1.634.000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025			P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH / (KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	10 dokumen	Rp612.000,00	10	dokumen	Rp14.088.900,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	10	dokumen	Rp12.454.900,00	DAU	-	-1.634.000	Efisiensi Anggaran
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	3 lembaga	Rp416.400,00	3	lembaga	Rp14.089.100,00	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	3	lembaga	Rp14.082.800,00	DAU	-	-6.300	
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 dokumen	Rp416.400,00	3	dokumen	Rp14.089.100,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	dokumen	Rp14.082.800,00	DAU	-	-6.300	Efisiensi Anggaran
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7,54%	Rp82.044.000,00	7,54	%	Rp100.908.900,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7,54	%	Rp70.084.900,00	DAU	-	-30.824.000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	95 lembaga	Rp82.044.000,00	95	lembaga	Rp100.908.900,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85	lembaga	Rp70.084.900,00	DAU	-10	-30.824.000	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp82.044.000,00	4	dokumen	Rp100.908.900,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	dokumen	Rp70.084.900,00	DAU	-	-30.824.000	Efisiensi Anggaran
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	3,17%	Rp856.800,00	3,17	%	Rp44.064.400,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	3,17	%	Rp42.880.400,00	DAU	-	-1.184.000	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	5%	Rp856.800,00	4,93	%	Rp44.064.400,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	4,93	%	Rp42.880.400,00	DAU	-	-1.184.000	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	Rp856.800,00	4	entitas	Rp44.064.400,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4	entitas	Rp42.880.400,00	DAU	-	-1.184.000	Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan dibidang PPLH Kabupaten	100%	Rp1.754.600,00	100	%	Rp108.714.700,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan dibidang PPLH Kabupaten	100	%	Rp87.564.100,00	DAU	-	-21.150.600	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100%	Rp1.754.600,00	100	%	Rp108.714.700,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%	Rp87.564.100,00	DAU	-	-21.150.600	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Ko ta yang ditindaklanjuti /ditangani	12 pengaduan	Rp1.197.500,00	12	pengaduan	Rp73.544.500,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	12	pengaduan	Rp61.329.000,00	DAU	-	-12.215.500	Efisiensi Anggaran
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kot a	6 perkara	Rp557.100,00	6	perkara	Rp35.170.200,00	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6	perkara	Rp26.235.100,00	DAU	-	-8.935.100	Efisiensi Anggaran
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	78%	Rp9.987.654.374,00	78	%	Rp6.907.474.100,00	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	78	%	Rp8.118.980.487,00	DAU	-	1.211.506.387	
			Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	43,70%		43,7	%			Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	43,7	%		DAU	-		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025					SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK			PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	23,40%	Rp9.987.654.374,00	23,4	%	Rp6.907.474.100,00	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	23,4	%	Rp8.118.980.487,00	DAU	-	1.211.506.387	
			Persentase capaian pengurangan sampah	30,60%		30,6	%			Persentase capaian pengurangan sampah	30,6	%		DAU	-		
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Rp1.224.061,00	2	dokumen	Rp40.355.013,00	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	dokumen	Rp38.521.500,00	DAU	-	-1.833.513	Efisiensi Anggaran
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	99.683 ton	Rp18.558.571,00	99.683	ton	Rp242.623.645,00	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	99.683	ton	Rp986.854.745,00	DAU	-	744.231.100	Tambahan atensi Bupati untuk pengelolaan sampah di Lekok (mesin gibrig (200.000.000), upah pengelola sampah (214.542.000), operasional lain (334.689.100))
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, SPA,PSEL/PLT Sa, RDF, pusat pengomposan, biodigester,Ba nk sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	127.798 ton	Rp97.665.000,00	127.798	ton	Rp97.665.000,00	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU , TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, SPA,PSEL/PLTS a, RDF, pusat pengomposan, biodigester,Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	0	Rp -	DAU	-127.798	-97.665.000	Efisiensi Anggaran
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat,Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 kelompok	Rp4.223.013,00	33	kelompok	Rp8.710.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat,Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33	kelompok	Rp8.710.000,00	DAU	-	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	Rp1.809.000,00	1	dokumen	Rp12.060.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	dokumen	Rp12.060.000,00	DAU	-	-	
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	12 unit	Rp2.043.470.729,00	12	unit	Rp6.403.921.442,00	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	12	unit	Rp6.570.695.242,00	PAT	-	166.773.800	Penambahan Gaji Non ASN Persampahan (796.068.900), Tambahan atensi Bupati untuk BBM Excavator (Pinjam PU,SDA, CKTR), Tambahan POKIR roda 3 B.Nik
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 unit	Rp7.761.500.000,00	12	unit	Rp42.935.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12	unit	Rp42.935.000,00	DAU	-	-	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8591 ton	Rp59.204.000,00	8591	ton	Rp59.204.000,00	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regiona	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8591	ton	Rp459.204.000,00	DAU	-	400.000.000	Tambahan atensi Bupati untuk penataan TPA wonokerto (tanah urug (200.000.000), bibit pohon sekeliling TPA (100.000.000), dok rencana pembenahan TPA (100.000.000)
	TOTAL				Rp28.998.995.502,00			Rp24.670.390.175,00					Rp25.357.531.185,00		Rp -	Rp687.141.010,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke-2 tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stake holder;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO